

## ABSTRAK

### TINA ULANDARI

Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peranan yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan nilai humaniora dan pemberdayaan Indonesia yang berkelanjutan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : perlindungan hak cipta karya tulis ilmiah atas tindakan memperbanyak buku terdaftar tanpa ijin pemegang hak, tanggung jawab pelaku atas kejahatan pidana tanpa seijin oleh pemegang hak memperbanyak buku terdaftar serta pertimbangan hakim atas kecelakaan lalu lintas dalam Putusan pertimbangan hukum hakim atas memperbanyak buku dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Perlindungan hak cipta karya tulis ilmiah atas tindakan memperbanyak buku terdaftar tanpa ijin pemegang hak Cipta yang melekat pada suatu karya tulis diterbitkan dalam bentuk suatu buku, jika dikembangkan lebih lanjut dapat terdiri dari sekumpulan hak-hak khusus (a bundle of special rights) yang masing-masing memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta yang berbeda. Tanggung jawab pelaku atas kejahatan pidana tanpa seijin oleh pemegang hak memperbanyak buku terdaftar KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme sebaliknya UUHC tidak menyebut secara eksplisit akan tetapi plagiarisme tersirat dalam pasal 13,14 dan 15 UUHC yang disebut dengan pengecualian dan pembatasan hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda. Pertimbangan hukum hakim atas memperbanyak buku dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018 *Judex Facti* kurang tepat menerapkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.Adl., tanggal 1 Maret 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Memperbanyak, Hak Cipta

## **ABSTRACT**

**TINA ULANDARI**

Higher Education as part of the national education system has a strategic role in educating the nation's life and advancing science and technology as well as implementing humanities values and sustainable Indonesian empowerment.

The problems in this study are: copyright protection for scientific papers for the act of reproducing registered books without the permission of the rights holders, the responsibility of the perpetrators for criminal crimes without permission by the holders of the rights to reproduce registered books as well as the judge's consideration of traffic accidents in the decision of the judge's legal considerations for reproducing book in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 365 K/Pid.Sus/2018.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

It is concluded that the copyright protection of scientific writings for the act of reproducing registered books without the permission of the copyright holder attached to a written work is published in the form of a book, if developed further it can consist of a bundle of special rights which each obtains different copyright legal protection. The responsibility of the perpetrator for a criminal crime without the permission of the rights holder to reproduce books registered with the Criminal Code does not recognize the term plagiarism otherwise the UUHC does not mention it explicitly, but plagiarism is implied in Articles 13, 14 and 15 of the UUHC which are referred to as copyright exceptions and restrictions, while copyright violations formulated separately in a separate article. The judge's legal considerations of reproducing books in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 365 K/Pid.Sus/2018 Judex Facti does not properly apply the provisions of Article 17 Paragraph (1) letter f juncto Article 8 Paragraph (2) of the Judicial Powers Act. Based on these considerations, and it turned out that the Judex Facti decision in this case did not conflict with the law and/or the Act, the Defendant's appeal for cassation was declared rejected with amendments. The decision of the High Court amending the Decision of the Andolo District Court Number 69/Pid.Sus/2016/PN.AdL., dated March 1 2017 regarding imprisonment and fines imposed on the Defendant.

Keywords: Criminal Liability, Reproduction, Copyright